****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

NOMOR : W3-A/2811 /KU.01/X/2021

**TENTANG**

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**TINGKAT WILAYAH SUMATERA BARAT**

**SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusun laporan keuangan;

b. bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Wilayah Sumatera Barat yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern (SPI) memadai, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Wilayah Sumatera Barat.

c. bahwa nama - nama yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat Wilayah Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 20010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 202 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negera/Daerah
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
9. Pearturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 694/SEK/SK/VII/2021 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi (SAI) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna ANggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01)
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;

Memperhatikan :1. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan adalah pengendalian secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang handal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah;

1. Catatan Hasil Reviu Bawas Mahkamah Agung RI atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Semester Pertama Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT WILAYAH SUMATERA BARAT;**

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama - nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah Sumatera Barat;

KEDUA : Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keungan Tingkat Wilayah Sumatera Barat mempunyai tugas membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan Pengendalian Intrn yang memadai serta reviu APIP dalam hal atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI sampai dengan 31 Januari 2022;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah bertanggung jawab kepada Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang;

KEEMPAT : Menetapkan nama - nama yang tercantum dalam lampiran dapat diberikan Surat Tugas untuk tindak lanjut di lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;

KELIMA : Ketentuan mengenai teknis operasional PIPK dapat diatur dalam Instrumen Penilaian dan rencana tindak lanjut pelaksanaannya yang disusun oleh Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Wilayah Sumatera Barat;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada DIPA masing - masing satker;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Maret 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Oktober 2021

Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

**IRSYADI, S.Ag., M.Ag**

**NIP.197007021996031005**

Salianan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Padang;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
9. Yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

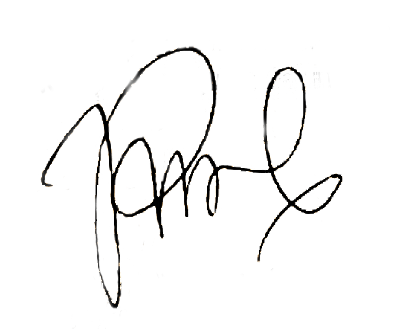
Nomor : W3-A/2811 /KU.01XI/2021

Tanggal : 25 Oktober 2021

**TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN**

**TINGKAT WILAYAH SUMATERA BARAT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Penanggunjawab | : | Irsyadi, S.Ag., M.Ag.  (Sekretaris PTA Padang) |
| Ketua | : | Mukhlis, S.H.  (Kepala Bagian Umum dan Keuangan PTA Padang) |
| Sekretaris | : | Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.  (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Padang) |
| Anggota | : | Budiman, S.H.  (Kepala Bagian Umum dan Keuangan PT Padang) |
| Anggota | : | Elsa Rusdiana, S.E.  (Analis Pengelola Keuangan APBN) |
| Anggota | : | Tessya Putri Permata Sari, SE., M.Si  (Analis Pengelola Keuangan APBN) |
| Anggota | : | Refyna Sumita, SE.  (Analis Pengelola Keuangan APBN) |
| Anggota | : | Dona Vivironika, SE.  (Analis Pengelola Keuangan APBN) |
| Anggota | : | Yova Nelindi, A.Md.  (Pengelola BMN) |
| Anggota | : | Efri Sukma  (Staf Sub Tata Usaha dan Rumah Tangga) |

Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Agama Padang

**IRSYADI, S.Ag., M.Ag.**

**NIP.197007021996031005**